

SKRIPSI

**STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERKELANJUTAN DI
KAWASAN PERMUKIMAN EKOWISATA MANGROVE LANTEBUNG
KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NUR AWALIAH SYAFITRI MASRY
D101171510



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERKELANJUTAN DI
KAWASAN PERMUKIMAN EKOWISATA MANGROVE LANTEBUNG
KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NUR AWALIAH SYAFITRI MASRY

D101171510

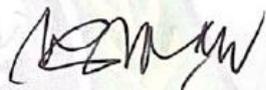
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 06 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001


Dr. Wiwik Wahidah Osman ST., MT
NIP. 19681022 200003 2 001

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin


Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Awaliah Syafitri Masry
NIM : D101171510
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Kawasan
Permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan



(Nur Awaliah Syafitri Masry)

KATA PENGANTAR

Penelitian tugas akhir dengan tema penanganan permukiman kumuh berkelanjutan ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis terhadap minimnya penerapan konsep berkelanjutan pada berbagai sektor pembangunan khususnya pada sektor perumahan dan permukiman. Proses penanganan permukiman kumuh memerlukan bentuk penanganan yang menerapkan prinsip berkelanjutan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong perekonomian masyarakat, dan mendukung kesejahteraan sosial serta kerjasama kemitraan melalui tata kelola kelembagaan.

Jika melihat kondisi saat ini, permukiman yang berkembang masih banyak yang tidak menerapkan konsep permukiman berkelanjutan tersebut beberapa hanya fokus pada perbaikan fisik lingkungan tanpa memerhatikan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut terjadi di kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, khususnya permukiman yang berada di sekitar kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung. Kondisi kekumuhan di lokasi tersebut, mengalami penurunan tingkat kekumuhan selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi berhasilnya penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah. Namun jika melihat kondisi eksisting, permukiman di kawasan tersebut masih jauh dari kondisi layak huni baik dari segi lingkungan ekonomi sosial dan kelembagaan.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna memberikan konsep strategi penanganan kumuh yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan pada masyarakat di kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung berdasarkan persepsi masyarakat setempat. Sehingga diharapkan luaran dari penelitian ini, mampu memberi solusi rekomendasi bentuk penanganan khususnya permukiman kumuh yang berkelanjutan sesuai dengan arahan pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada poin ke 11 yaitu membangun kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian tugas akhir ini dan

penyempurnaan penelitian selanjutnya. Akhir kata, harapan yang ingin dicapai adalah penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi pemerintah, pihak akademisi, hingga masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pembangunan permukiman. Semoga Allah meridhoi segala usaha yang telah dilakukan. Terima Kasih.

Makassar, 06 Juni 2022

(Nur Awaliah Syafitri Masry)

Sitasi dan Alamat Kontak

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut.

Awaliah Syafitri Masry, Nur. 2022. *Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Kawasan Permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Skripsi Sarjana. Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: masrynas17d@student.unhas.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah-Rabbil'alamiin. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Penulisan penelitian tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Drs. Masry dan Ibu Andi Armi, SH) atas curahan kasih sayang dan cinta dalam memberikan dukungan, semangat, serta pengorbanan dan doa tanpa henti untuk penulis selama perjalanan kehidupan penulis;
2. Saudara-saudara terkasih (Muh. Jumhur Dwi Sakti Masry, Nurmala Masry, Fatwa Fatahillah Masry, dan Muhammad Alfian Masry) atas semangat, dukungan, gurauan, canda, tawa, yang memberi warna dalam hidup penulis;
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc) atas izin yang diberikan untuk melanjutkan penelitian;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. M. Isran Ramli. S.T., M.T) atas fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung kelancaran penelitian;
5. Kepala Departemen sekaligus Ketua Prodi S1 - Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai dosen penasehat akademik (Bapak Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si) yang selalu memberi motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan kepada penulis;
6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si dan Ibu Dr. Wiwik Wahidah Oesman, ST., M.T) atas ilmu, bimbingan, serta waktu dan tenaga yang diluangkan untuk kesuksesan penelitian;

7. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr. Tech. Yashinta K. D. Sutopo, ST. MIP) atas arahan dan bimbingannya dalam memberikan nasihat tiada henti kepada penulis;
8. Seluruh dosen di Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Hasanuddin atas ilmu dan bimbingan berharga yang diberikan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Seluruh staf administrasi di Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Hasanuddin terkhusus untuk (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos) atas kemurahan hati untuk membantu pengurusan administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Teman-teman *Labo-Based Education (LBE) Housing and Settlements* yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, motivasi, kebersamaan, dan kemurahan hati untuk berbagi ilmu.
11. Sahabat seperjuangan (Mifta Farid Salam, S.E., M.M.) yang senantiasa memberi dukungan dan semangat tiada henti kepada penulis;
12. Rekan kerja (Dewi Sartika Mahmud S.E, Aas Mahari S.S, Sri Anggraeni Rahman S.Pd, Adnin Amiruddin S.PWK, Suhairah Amaliyah S.PWK) atas dukungan dan motivasinya kepada penulis;
13. Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Unhas khususnya rekan pada studio tugas akhir di tim 8 yang telah memberikan suka, duka, tawa dan pelajaran berharga dalam hidup penulis.

Tentu masih banyak pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan saran membangun dalam penelitian ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya dalam pengembangan ilmu perencanaan wilayah kota di Sulawesi Selatan.

Makassar, 06 Juni 2022

(Nur Awaliah Syafitri Masry)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Keluaran Penelitian.....	4
1.6 Hasil Penelitian.....	4
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	4
1.7.2 Ruang Lingkup Substansi.....	5
1.8 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Permukiman Kumuh.....	7
2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh.....	8
2.3.2 Karakteristik Permukiman Kumuh.....	9
2.2 Penanganan Permukiman Kumuh.....	13
2.2.1 Program Kota Tanpa Kumuh.....	14

2.2.2 Revitalisasi RTLH.....	15
2.2.3 Program BSPS.....	16
2.3 Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan.....	16
2.4 Pembangunan Permukiman berkelanjutan.....	17
2.4.1 Perumahan dan Permukiman.....	17
2.4.2 Tipe Permukiman.....	18
2.4.3 Konsep Permukiman Berkelanjutan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Jenis Data.....	46
3.4 Populasi dan Sampel.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
3.6.1 Tujuan Penelitian Pertama.....	50
3.6.2 Tujuan Penelitian Kedua.....	50
3.6.3 Tujuan Penelitian Ketiga.....	52
3.7 Variabel Penelitian.....	53
3.8 Kebutuhan Data.....	57
3.9 Definisi Operasional.....	63
3.10 Kerangka Penelitian.....	64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	66
4.1.1 Letak Geografis, batas, dan Luas Wilayah.....	66
4.1.2 Kondisi Demografi.....	64
4.1.3 Kawasan Strategis Kota.....	6
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea.....	70
4.2.1 Letak Geografis, Batas, dan Luas Wilayah.....	72
4.2.2 Kondisi Demografi.....	75
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75

Batas dan Luas Wilayah.....	75
4.3.1 Bentuk Penanganan Kumuh.....	76
4.3.2 Tata Guna Lahan.....	77
4.3.3 4.3.3 Karakteristik Masyarakat.....	75
4.4 Karakteristik Permukiman Kumuh di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.....	80
4.4.1 Aspek Lingkungan.....	80
4.4.2 Aspek Ekonomi.....	105
4.4.3 Aspek Sosial Budaya.....	108
4.4.4 Aspek Kelembagaan.....	112
4.5 Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Permukiman di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.....	113
4.5.1 Aspek Lingkungan.....	113
4.5.2 Aspek Ekonomi.....	120
4.5.3 Aspek Sosial Budaya.....	123
4.5.4 Aspek Kelembagaan	128
4.5.5 Hasil Analisis.....	132
4.6 Strategi Penanganan ekowisataPermukiman Kumuh Berkelanjutan di Kawasan Permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.....	136
BAB V PENUTUP.....	145
5.1 Kesimpulan.....	145
5.2 Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	153
LAMPIRAN.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep pembangunan berkelanjutan (Ervianto WI, 2019).....	28
Gambar 2.2	Peta Jalur Menuju Ekowisata Mangrove Lantebung.....	36
Gambar 3.1	Peta lokasi penelitian skala 1 : 35000.....	44
Gambar 3.2	Peta lokasi penelitian skala 1 : 8000.....	45
Gambar 3.3	Skema Tahap Analisis.....	51
Gambar 3.4	Kerangka penelitian.....	65
Gambar 4.1	Peta kawasan strategis kota Makassar.....	69
Gambar 4.2	Peta administrasi kecamatan Tamalanrea.....	71
Gambar 4.3	Peta administrasi kelurahan Bira.....	74
Gambar 4.4	Diagram pertumbuhan penduduk di Kelurahan Bira.....	75
Gambar 4.5	Peta tata guna lahan di lokasi penelitian.....	79
Gambar 4.6	Jenis struktur bangunan di lokasi penelitian.....	81
Gambar 4.7	Persentase jumlah bangunan yang memenuhi kriteria ketahanan bangunan di lokasi penelitian.....	80
Gambar 4.8	Peta distribusi RTLH di lokasi penelitian.....	87
Gambar 4.9	Kondisi jalan di lokasi penelitian.....	88
Gambar 4.10	Peta kondisi jalan di lokasi penelitian.....	90
Gambar 4.11	Kondisi drainase.....	91
Gambar 4.12	Peta kondisi drainase di lokasi penelitian.....	93
Gambar 4.13	Peta Lokasi Titik Drainase Mengalami Rusak Parah.....	94
Gambar 4.14	Peta Lokasi Titik Drainase Mengalami Sedimentasi.....	95
Gambar 4.15	Sumber air bersih di lokasi penelitian.....	97
Gambar 4.16	Ilustrasi pola pengolahan sampah di lokasi penelitian.....	99
Gambar 4.17	Peta sebaran RTH di lokasi penelitian.....	102
Gambar 4.18	Proyeksi pertumbuhan penduduk di Kelurahan Bira.....	104
Gambar 4.19	Kualifikasi jenis mata pencaharian utama masyarakat di lokasi penelitian.....	105
Gambar 4.20	Klasifikasi tingkat pendapatan masyarakat di lokasi penelitian.....	106

Gambar 4.21	Hasil identifikasi jenis sumber pendapatan lain masyarakat di lokasi penelitian.....	107
Gambar 4.22	Peta distribusi sarana kesehatan dan pendidikan di lokasi penelitian.....	111
Gambar 4.23	Persentase hasil identifikasi indikator layak huni dilokasi penelitian berdasarkan hasil observasi.....	114
Gambar 4.24	Persentase hasil identifikasi indikator kerapatan bangunan dilokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	114
Gambar 4.25	Peta kesesuaian pola ruang di lokasi penelitian.....	116
Gambar 4.26	Persentase hasil identifikasi kualitas akses jalan di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	117
Gambar 4.27	Persentase hasil identifikasi kualitas sistem drainase lingkungan di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	118
Gambar 4.28	Persentase hasil identifikasi kualitas pengelolaan persampahan di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	118
Gambar 4.27	Persentase hasil identifikasi kualitas infrastruktur dasar di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	113
Gambar 4.28	Persentase jenis keterampilan yang dikuasai oleh masyarakat di lokasi penelitian.....	114
Gambar 4.29	Persentase hasil identifikasi tingkat pendapatan masyarakat di lokasi penelitian.....	119
Gambar 4.30	Persentase jenis keseterampilan yang dikuasai oleh masyarakat di lokasi penelitian.....	120
Gambar 4.31	Persentase Hasil Identifikasi tingkat pendapatan masyarakat di Lokasi Penelitian.....	121
Gambar 4.32	Persentase hasil identifikasi sumber pendapatan lain masyarakat di lokasi penelitian.....	122
Gambar 4.33	Persentase hasil identifikasi status kepemilikan lahan masyarakat di lokasi penelitian.....	123
Gambar 4.34	Persentase hasil identifikasi interaksi sosial masyarakat di	124

	lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	
Gambar 4.35	Persentase hasil identifikasi akses transportasi umum di lokasi penelitian.....	125
Gambar 4.36	Persentase hasil identifikasi nilai budaya di lokasi penelitian.....	124
Gambar 4.37	Persentase hasil identifikasi pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	126
Gambar 4.38	Persentase hasil identifikasi tingkat kriminalitas di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	127
Gambar 4.39	Persentase hasil identifikasi bentuk kerjasamadan kemitraan di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	123
Gambar 4.40	Persentase hasil identifikasi keterlibatan masyarakat di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	129
Gambar 4.41	Persentase hasil identifikasi pelaksanaan program penanganan kumuh di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	130
Gambar 4.42	Persentase hasil identifikasi keaktifan lembaga dan komunitas di lokasi penelitian berdasarkan persepsi masyarakat.....	132
Gambar 4.43	Diagram <i>leverage</i> aspek lingkungan pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.....	127
Gambar 4.44	Diagram <i>leverage</i> aspek ekonomi pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.....	133
Gambar 4.45	Diagram <i>leverage</i> aspek sosial budaya pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.....	134
Gambar 4.46	Diagram <i>leverage</i> aspek kelembagaan pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.....	135
Gambar 4.47	Diagram SWOT strategi penanganan permukiman kumuh pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebun...	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan.....	17
Tabel 2.2	Konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai sumber.....	25
Tabel 2.3	Kriteria yang digunakan dalam menilai keberlanjutan berdasarkan indikator berkelanjutan dari berbagai sumber.....	27
Tabel 2.4	Tujuan pembangunan berkelanjutan.....	29
Tabel 2.5	Target tujuan SDGs.....	30
Tabel 2.6	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	Kriteria kebutuhan sampel.....	48
Tabel 3.2	Tabel kategori keberlanjutan berdasarkan nilai indeks hasil analisis.....	51
Tabel 3.3	MAtriks SWOT.....	53
Tabel 3.4	Penentuan nilai skor tingkat keberlanjutan permukiman dikawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.....	54
Tabel 3.5	Kebutuhan data penelitian.....	58
Tabel 4.1	Kecamatan di kota Makassar.....	66
Tabel 4.2	Jumlah penduduk di kota Makassar.....	67
Tabel 4.3	Kawasan strategis kota di kota Makassar.....	67
Tabel 4.4	Luas wilayah menurut kelurahan.....	70
Tabel 4.5	Jumlah RT, RW, dan Rumah Tangga menurut kelurahan.....	72
Tabel 4.6	Jumlah penduduk dan jenis kelamin di kecamatan Tamalanrea.....	72
Tabel 4.7	Jumlah penduduk di kelurahan Bira berdasarkan jenis kelamin.....	75
Tabel 4.8	Luas kawasan menurut RW di kelurahan Bira.....	76
Tabel 4.9	Distribusi jumlah perbaikan RTLH di tiap RW di kelurahan Bira.....	77
Tabel 4.10	Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	77
Tabel 4.11	Jumlah responden berdasarkan kelompok usia.....	78
Tabel 4.12	Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	78

Tabel 4.13	Jumlah bangunan berdasarkan jenis bangunan.....	80
Tabel 4.14	Jumlah bangunan berdasarkan material atap lantai dinding....	81
Tabel 4.15	Hasil identifikasi bangunan yang memenuhi kriteria kecukupan luas bangunan.....	85
Tabel 4.16	Kondisi lebar jalan di lokasi penelitian.....	89
Tabel 4.17	Kondisi drainase di lokasi penelitian.....	92
Tabel 4.18	Sumber air bersih yang digunakan masyarakat.....	96
Tabel 4.19	Kualitas air bersih di lokasi penelitian.....	97
Tabel 4.20	Hasil identifikasi indikator sanitasi yang memenuhi syarat berkelanjutan.....	98
Tabel 4.20	Analisis sistem pengolahan persampahan.....	99
Tabel 4.21	Kondisi proteksi kebakaran di lokasi penelitian berdasarkan ketersediaan sarana prasarana.....	99
Tabel 4.22	Jenis usaha mikro masyarakat.....	100
Tabel 4.23	Proyeksi Sarana Prasarana di kelurahan Bira pada 20 tahun mendatang.....	104
Tabel 4.24	Jenis Usaha Mikro Masyarakat.....	107
Tabel 4.25	Jenis pelatihan keterampilan di lokasi penelitian.....	109
Tabel 4.26	Lembaga dan komunitas yang dibentuk masyarakat di lokasi penelitian.....	112
Tabel 4.27	Nilai ordinasi dimensi keberlanjutan permukiman kumuh di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung.....	135
Tabel 4.28	Klasifikasi faktor internal dan eksternal.....	137
Tabel 4.29	Matriks IFAS strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung ..	139
Tabel 4.30	Matriks EFAS strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung...	139
Tabel 4.31	Perumusan komponen strategi menggunakan analisis matriks SWOT.....	141

STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERMUKIMAN EKOWISATA MANGROVE LANTEBUNG KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Nur Awaliah Syafitri Masry^{1)*}, Mimi Arifin^{2)*}, Wiwik Wahidah Osman^{3)*}

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: masrynas17d@student.unhas.ac.id

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: w_wahidahosman@yahoo.com

ABSTRAK

Selama lima tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kekumuhan di kelurahan Bira. Meskipun begitu, kawasan permukiman di lokasi tersebut belum memenuhi syarat permukiman yang berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari kondisi permukiman yang masih kumuh khususnya kawasan permukiman di sekitar Ekowisata Mangrove Lantebung. Tujuan penelitian ini: mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung; menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan permukiman di kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung; menyusun strategi penanganan kumuh berkelanjutan di kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, analisis *multidimensional scalling*, dan analisis SWOT. Teknik pengambilan sampel adalah *non probability sampling*, dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian berupa: karakteristik permukiman menunjukkan masih adanya bangunan permukiman yang termasuk rumah tidak layak huni; faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan permukiman adalah kualitas drainase lingkungan, ketersediaan dana pengelolaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ketersediaan program penanganan kumuh. Strategi penanganan berfokus pada peningkatan kualitas permukiman, perbaikan sarana prasarana pendukung ekowisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Permukiman, Kumuh, Berkelanjutan, Ekowisata, Lantebung.

SUSTAINABLE SLUM HANDLING STRATEGIES IN THE SETTLEMENTS OF LANTEBUNG MANGROVE ECOTOURISM AREA AT BIRA VILLAGE TAMALANREA DISTRICT OF MAKASSAR

Nur Awaliah Syafitri Masry^{1)*}, Mimi Arifin^{2)*}, Wiwik Wahidah Osman^{3)*}

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: masrynas17d@student.unhas.ac.id

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: w_wahidahosman@yahoo.com

ABSTRACT

The level of slum in Bira has been decrease over the past five years. But, settlement areas in these locations have not qualified for sustainable settlements from both environmental, economic, social, and institutional aspects. There is no improvement in community seen from the condition of slum settlements, especially settlement areas around Lantebung Mangrove Ecotourism. The purpose in this study are: to identify the characteristics of slums in the Lantebung Mangrove Ecotourism settlement area; identifying what factors affect the sustainability of settlements in the Lantebung Mangrove Ecotourism area; formulate a strategy for handling sustainable slums in the Lantebung Mangrove Ecotourism settlement area. The analytical techniques used are qualitative and quantitative descriptive analysis, multidimensional scalling analysis, also SWOT analysis. Sampling technique is non probability sampling, with purposive sampling method. The results obtained are the characteristics of settlements indicate the existence of residential buildings that include uninhabitable houses; Factors that most affect the sustainability of settlements are the quality of environmental drainage, the availability of infrastructure management funds, community empowerment, and the availability of slum handling programs. sustainable slum management strategies that meet environmental, economic, social, and institutional aspects that are in accordance with the characteristics of the region and the factors that most affect sustainability. The handling strategy focuses on improving the quality of settlements, improving infrastructure supporting ecotourism, improving community welfare.

Keywords: Settlements, Slum, Sustainable, Ecotourism, Lantebung

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh di perkotaan merupakan salah satu masalah yang tidak mudah untuk diatasi. Masih kurangnya pengadaan perumahan untuk masyarakat ekonomi rendah memicu kemunculan bangunan-bangunan liar yang menempati lahan milik negara. Bangunan yang terbangun juga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan kondisi fisik bangunan berdempet dan kualitas konstruksi sangat rendah. Tidak efektifnya upaya penanganan permukiman kumuh juga disebabkan karena intervensi pemerintah hanya bersifat fisik dan tidak memperhatikan aspek lainnya yaitu bina manusia dan bina ekonomi yang merupakan bagian dari aspek pembangunan berkelanjutan (Rama dkk, 2018).

Merujuk pada Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, salah satu tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh berkelanjutan perlu menjadi perhatian berbagai pihak, utamanya dalam mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Pembangunan permukiman yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan berperan penting dalam mencapai pembangunan perkotaan berkelanjutan sesuai arahan tujuan 11 SDGs (Suhono A, 2016).

Salah satu target yang diharap bisa tercapai dalam tujuan tersebut adalah penanganan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Poin pertama pada tujuan 11 adalah membangun kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan standar hidup di permukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan. Indikator pencapaian pada tujuan 11 adalah peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kelurahan Bira termasuk sebagai salah satu daerah yang telah menerima berbagai program penanganan permukiman dari pemerintah. Menurut Surat Keputusan Walikota Makassar mengenai penetapan lokasi kumuh di Kota Makassar tahun 2014 permukiman di kelurahan Bira pada awalnya termasuk dalam kawasan dengan tingkat kekumuhan kategori sedang dengan luasan kumuh mencapai 22.98 Ha. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan terbaru Walikota Makassar mengenai Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh tahun anggaran 2018 luasan kumuh di kelurahan Bira mengalami perubahan dengan luasan dan tingkat kekumuhan menjadi 17.17 Ha. Di tahun 2021 hasil terbaru pada surat keputusan walikota Makassar menunjukkan luasan kumuh di Kelurahan Bira berkurang menjadi 2.65 Ha dengan status kekumuhan menjadi kawasan dengan kategori kumuh ringan.

Meskipun mengalami penurunan tingkat kekumuhan, kawasan permukiman yang ada di lokasi tersebut belum memenuhi syarat sebagai permukiman yang berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari kondisi permukiman yang masih kumuh khususnya kawasan permukiman di sekitar Ekowisata Mangrove Lantebung. Padahal lokasi tersebut termasuk salah satu kawasan strategis kota dalam sudut pandang peningkatan ekonomi sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034. Lokasi strategis dan potensial tersebut perlu didukung dengan penanganan permukiman yang sesuai dengan arahan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat secara holistik aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan permukiman kumuh menurut persepsi masyarakat dengan mengaitkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini dirasa perlu agar menjadi salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam memberikan arahan penanganan permukiman kumuh di lokasi

penelitian, sehingga menjadikan lingkungan permukiman yang ada di sekitar kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung kelurahan Bira tersebut menjadi lingkungan permukiman yang layak huni sesuai dengan target pada tujuan 11 pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan permukiman pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung?
3. Bagaimana strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan di kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung
2. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan permukiman pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung
3. Menyusun strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi civitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan, kajian, ataupun tambahan pengetahuan bagi para pihak pengembang ilmu dalam memberikan informasi mengenai strategi penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan dan untuk diteruskan kepada masyarakat di lokasi penelitian sebagai bagian pengabdian masyarakat;
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan inovasi, ide, dan

beberapa alternatif arahan bagi para pihak yang berwenang untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan serta perbaikan dan peningkatan dalam hal penerapan program penanganan permukiman kumuh yang tidak hanya bersifat fisik tapi mengarah pada kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga target pada tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai;

1.5 Keluaran Penelitian

Adapun keluaran (*output*) penelitian yang dihasilkan yaitu:

1. Laporan penelitian yang tersusun secara sistematis sebagai latihan pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota; dan
2. Jurnal, poster, *Summary book* mengenai strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan.

1.6 Hasil Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, Hasil yang diharapkan yaitu:

1. Meningkatkan perhatian, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat untuk turut membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan khususnya pada pemenuhan akses terhadap hunian yang layak huni dan berkelanjutan;
2. Adanya strategi penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan sehingga mampu menjadi rujukan dalam penanganan permukiman di kawasan lain yang berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi penelitian adalah permukiman di kelurahan Bira, kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun 2021 lokasi kumuh di kelurahan Bira tersebar di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berada pada permukiman yang telah mendapatkan penanganan permukiman kumuh yaitu permukiman di RW 01, RW 04, dan RW 06 di kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea. Namun ruang lingkup wilayah penelitian berpusat di sekitar kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung di

RW 04 dan RW 06.

1.7.2 Ruang Lingkup Substansi

Substansi pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penjabaran karakteristik fisik dan non fisik permukiman di lokasi penelitian. Langkah yang dilakukan berupa identifikasi karakteristik permukiman di lokasi penelitian
2. Penjabaran faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberlanjutan permukiman berdasarkan indikator berkelanjutan pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung.
3. Penyusunan strategi penanganan permukiman kumuh berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik kumuh lokasi penelitian dan faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan permukiman pada kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan dan saran yang disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut.

1. Bagian pertama pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan , manfaat, *output* penelitian, *outcome* penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bagian kedua kajian pustaka, menjelaskan mengenai teori-teori dan kajian literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian, mengkaji penelitian terdahulu terkait penanganan permukiman kumuh, kajian mengenai pembangunan permukiman berkelanjutan, permukiman kumuh dan bentuk penanganan yang dilakukan pemerintah, serta literatur lain yang berkaitan dengan karakteristik permukiman di kawasan ekowisata.
3. Bagian ketiga metode Penelitian, menjelaskan mengenai langkah- langkah yang dilakukan pada saat penelitian agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur guna mencapai tujuan penelitian ini. Variabel-variabel pendukung dalam bab ini yaitu terdapat lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis dalam perencanaan permukiman berkelanjutan, definisi operasional, kebutuhan data,

serta kerangka penelitian.

4. Bagian keempat gambaran umum, menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu kawasan permukiman di sekitar ekowisata mangrove Lantebung, kelurahan Bira, gambaran umum Kecamatan Tamalanrea dan pemaparan data yang telah dikumpulkan, pengolahan data, serta analisis yang dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pertama.
5. Bagian kelima kesimpulan dan saran, kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Terdapat pula saran yang berkaitan dengan penanganan permukiman berkelanjutan serta saran untuk para peneliti yang hendak mengambil permasalahan yang sama.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh diukur berdasarkan kondisi ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan serta sarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat, dan ditemukan bangunan permukiman yang tidak layak huni. Penjelasan mengenai pengertian permukiman kumuh dan karakteristik dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Widyastuty (2019) menyebut permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Didukung oleh pendapat Jamaludin (2015) dalam Widyastuty (2019) bahwa keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri- ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari penampilan fisik bangunan, pendapatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik, kondisi sosial dengan banyaknya tindakan kejahatan ataupun kriminal, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

Sedangkan Suparto (2014) mendefinisikan permukiman kumuh dengan lebih melihat pendekatan masyarakat dan huniannya bahwa perumahan kumuh atau permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal atau rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. Sedangkan Budiharjo (2005) dalam Fitria N dkk (2014) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak

terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Berdasarkan Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan Direktorat Pengembangan Permukiman (2006), standar indikator Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan yang menunjukkan tingkat Kekumuhan suatu lingkungan permukiman dikondisikan dalam lima aspek:

- 1) Kondisi Lokasi. Kondisi lokasi ini menggambarkan lokasi kawasan kumuh untuk dilakukan penilaian tingkat kekumuhannya. Dengan indikator status legalitas tanah, status penggunaan penguasaan lahan, frekuensi bencana kebakaran, frekuensi bencana tanah longsor.
- 2) Kondisi Kependudukan. Kondisi kependudukan menggambarkan tingkat kepadatan penduduk yang berada di kawasan kumuh untuk menilai tingkat kekumuhannya. Adapun indikatornya adalah tingkat kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah KK per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk.
- 3) Kondisi Bangunan. Kondisi bangunan menggambarkan kualitas bangunan pada bangunan yang berada di kawasan kumuh. Adapun indikatornya adalah tingkat kualitas struktur bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat Kesehatan dan kenyamanan bangunan, tingkat penggunaan luas lantai bangunan. Tingkat kepadatan bangunan terdiri dari kepadatan tinggi dengan jumlah rumah yang ada lebih dari 100 unit per hektar, kepadatan sedang dengan jumlah rumah 60 hingga 100 rumah per hektar, serta kepadatan rumah rendah dengan jumlah rumah di bawah 60 unit per hektar.
- 4) Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar. Kondisi sarana dan prasarana dasar merupakan kebutuhan akan fasilitas umum dasar yang ada pada kawasan kumuh, sehingga penilaian yang dilakukan adalah tentang layak atau tidaknya dan jumlahnya telah memenuhi syarat atau tidak.
- 5) Kondisi Sosial Ekonomi. Kondisi sosial ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan yang ada di kawasan kumuh. Indikatornya meliputi, tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan.

2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh dijelaskan berdasarkan karakteristik fisik dan non fisik.

1. Karakteristik Fisik

Karakteristik permukiman kumuh tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman. Karakteristik tersebut dapat ditinjau berdasarkan hal berikut.

a. Kondisi Bangunan

Kriteria bangunan gedung ditinjau dari ketidakteraturan bangunann mencakup tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Adapun ketidakteraturan bangunan yang dimaksud adalah tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona serta tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. Sedangkan untuk kepadatan bangunan yang tinggi merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan RTBL serta Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan RTBL.

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat adalah kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Persyaratan teknis kualitas bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) pengendalian dampak lingkungan
- 2) pembangunan bangunan gedung di atas dan di bawah tanah, di atas dan di bawah air, di atas dan di bawah prasarana dan sarana umum
- 3) keselamatan bangunan gedung
- 4) kesehatan bangunan gedung
- 5) kenyamanan bangunan gedung
- 6) kemudahan bangunan gedung

b. Kondisi Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, serta kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

c. Ketersediaan Air Bersih

Dalam hal penyediaan air bersih mencakup ketidaktersediaan akses aman air, serta tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. Ketidaktersediaan akses aman air bersih merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air bersih masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter per orang perhari.

d. Kondisi Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Kriteria kumuh menunjukkan tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan saluran lokal.

e. Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku, serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus atau

kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual atau domestik, komunal maupun terpusat. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi sarana dan psarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

f. Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup sarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, serta tidak terpeliharanya sarana dan sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Sarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman harus memenuhi persyaratan teknis yaitu tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan, gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

g. Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi mencakup ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran, dan data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran antara lain terdiri Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran yaitu memiliki hydran lingkungan, jalan lingkungan lebar 4 meter bebas hambatan, memiliki sarana komunikasi dan Sambungan siamese.

Ciri lain permukiman kumuh menurut UNCHS dalam Suharini E (2007) antara lain kawasan permukaan yang pada mulanya mendapat ijin, namun seiring waktu mengalami penurunan kualitas dan kondisi kepadatan rumahnya tinggi.

2. Karakteristik Nonfisik

Karakteristik nonfisik yang ditinjau dalam penelitian ini mencakup karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya. Karakteristik sosial merupakan karakteristik atau ciri khas yang ada pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Watung dkk (2013) mengemukakan karakteristik sosial masyarakat disuatu wilayah meliputi berbagai aspek atau tingkatan seperti tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status sosial, jumlah tanggungan anggota keluarga, tingkat kesehatan, dan umur. Begitupun karakteristik sosial masyarakat permukiman kumuh dilihat dari segi umur, pekerjaan, pendidikan dan status pernikahan.

Kondisi ekonomi yaitu merupakan suatu keadaan yang dilihat dari faktor ekonomi. Pada masyarakat permukiman kumuh dapat dicirikan kondisi ekonominya yaitu dengan tingkat pendapatan rendah dan jenis pekerjaan yang bersifat informal (Sukmaniar, 2013). Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah permukiman kumuh dapat dilihat dari tingkat pendapatan keluarga guna membantu prekonomian keluarga. Masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh akibat tekanan urbanisasi umumnya bekerja sebagai pedagang dan sebagai buruh, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang rendah (Saputra dan Munandar, 2018).

Karakteristik budaya masyarakat dalam hal ini dikaitkan dengan lokasi wilayah penelitian yang berada pada kawasan pesisir. Menurut Kistanto NH (2019) kebudayaan adalah tingkah laku hasil belajar yang dilaksanakan oleh para warga masyarakat. Perwujudan kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya, berupa perilaku dan benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Koentjaraningrat dalam Kistanto NH (2019) mengategorikan kebudayaan dalam tujuh unsur. Kebudayaan dalam sistem sosial budaya berisi tujuh unsur universal

antara lain, sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, sistem religi dan upacara keagamaan, kesenian, serta bahasa.

2.2 Penanganan Permukiman Kumuh

Pola penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah terdiri dari pola penanganan fisik dan nonfisik. Pola pemugaran fisik terdiri dari pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Sedangkan non fisik meliputi pembangunan aset produktif masyarakat berupa modal manusia, modal sosial, dan modal ekonomi. Pelaksanaan bentuk penanganan tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu hak keperdataan masyarakat terdampak, kondisi ekologis lokasi, kondisi sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat terdampak. Berikut bentuk penanganan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman:

a. Pemugaran

Pemugaran merupakan bentuk pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Pemugaran dilakukan dengan merehabilitasi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, serta proteksi kebakaran. Bentuk penanganan ini merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap permukiman kumuh yang berdiri diatas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

b. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan dengan pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan sarana pendukungnya. Hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

c. Permukiman Kembali

Permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan

penghuni dan masyarakat sekitar. Pada tahap ini pemerintah menyiapkan *new site development* dan pembangunan rumah susun sederhana.

Bentuk penanganan untuk kawasan kumuh berat berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal. Jika termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang maka bentuk penanganan berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan illegal. Sedangkan untuk kawasan dengan klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal adalah pemugaran dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal.

2.2.1 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Saat ini program nasional dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang menganut prinsip berkelanjutan adalah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program tersebut adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh. Kegiatan penanganan kumuh tersebut meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Program ini sejatinya untuk mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota atau kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama. Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program

Kotaku selalu menerapkan penapisan atau pengamanan lingkungan dan sosial.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui kegiatan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, serta pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat.

2.2.2 Revitalisasi RTLH

Revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Secara harfiah revitalisasi adalah upaya memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup namun mengalami kemunduran dan degradasi. Menurut Hasanuddin BP (2014) proses revitalisasi bagian kota mencakup aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi untuk meningkatkan kondisi fisik kota.

Menurut Prihatno (2016) Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu yang meliputi beberapa hal seperti intervensi fisik, rehabilitasi ekonomi, dan rehabilitasi sosial. Intervensi fisik meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, ruang terbuka hijau, sistem penghubung, reklame, dan ruang terbuka kawasan. Rehabilitasi ekonomi dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan informal dan formal yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan nilai tambah pada suatu kawasan permukiman khususnya permukiman kumuh. Sedangkan Revitalisasi sosial bertujuan meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat, hal ini dilakukan melalui penataan kawasan yang mendukung kondisi sosial budaya masyarakat pada kawasan permukiman kumuh.

Menurut data Kementerian PUPR (2016) dalam Modul Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, kriteria Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

- a) Konstruksi bangunan membahayakan
- b) Standar luasan ruang kurang dari 9 m² per orang
- c) Pencahayaan alami kurang (remang- remang atau gelap pada siang hari).
- d) Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
- e) Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
- f) Terletak di daerah membahayakan
- g) Air bersih belum/tidak memenuhi standar
- h) Sanitasi buruk

Berdasarkan interpretasi dari berbagai teori dapat disimpulkan bahwa revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bentuk pengentasan dan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas dan kondisi sarana dasar pada suatu kawasan permukiman khususnya pada kawasan permukiman kumuh.

2.2.3 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendorong peningkatan kualitas kawasan kumuh adalah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan kualitas rumah melalui pembangunan rumah beserta sarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan yang diberikan berupa pemberian uang tunai untuk melaksanakan perbaikan rumah bagi warga yang memenuhi kriteria. Bentuk bantuan juga berupa bahan bangunan dan upah kerja. Besaran bantuan yang diberikan 20 juta rupiah dengan pembagian 17.5 juta untuk bahan bangunan dan 2.5 juta untuk upah kerja. Adapun kriteria penerima program adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas serta bermukim pada bangunan yang termasuk rumah tidak layak huni.

2.3 Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan

Dalam menilai penerapan aspek berkelanjutan dalam penanganan permukiman

kumuh, Rama M (2018) menggunakan beberapa parameter dari empat aspek berkelanjutan dijelaskan pada **Tabel 2.1** sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan

Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian Penanganan Dengan Karakteristik Lingkungan • Pencegahan Dampak Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya partisipasi/keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program • Inklusi sosial/keterlibatan yang terbuka bagi seluruh program • Terbentuknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan infrastruktur terbangun • Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
Aspek ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan <i>skill</i> (keterampilan) dan ekonomi masyarakat • Adanya <i>Job Creation</i> (penciptaan lapangan kerja) • Tersedianya dana pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun
Aspek Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga tetap serta mempunyai struktur dan pembagian tugas yang jelas • Adanya lembaga yang responsif • Adanya lembaga yang mempunyai kemampuan dalam penanganan permukiman

Sumber: Rama dkk, 2018

Teori diatas berfokus pada keberlanjutan dari penanganan permukiman pada kawasan kumuh yang telah ditangani oleh pemerintah.

2.4 Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

Pembangunan permukiman berkelanjutan diinterpretasikan dalam berbagai teori. Tidak ada standar khusus yang berlaku terutama mengenai penanganan permukiman kumuh. Sehingga dalam pembahasan ini dijabarkan berbagai teori mengenai permukiman berkelanjutan.

2.4.1 Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut.

- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari

satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

- c. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman Menurut Yunus HS dalam Wesnawa (2015) diartikan sebagai hunian yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya baik sementara atau untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Sadana (2014) memberi perbedaan antara perumahan dan permukiman dengan melihat fungsi dan kegunaannya. Permukiman diartikan sebagai tempat untuk menetap dan melangsungkan hidup didalamnya seperti mencari nafkah. Perumahan diartikan hanya sebagai kumpulan bangunan yang menjadi tempat tinggal tanpa memperhitungkan mengenai fungsi kelangsungan hidup seperti mencari nafkah.

2.4.2 Tipe Permukiman

Wesnawa (2015) membagi tipe permukiman dalam dua kategori yaitu tipe permukiman berdasarkan waktu hunian dan menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

a. Tipe Permukiman berdasarkan waktu hunian

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari, dihuni hanya untuk beberapa bulan, dan hunian hanya untuk beberapa tahun. Tipe permanen umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat permukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.

b. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

Karakteristik fisik diartikan sebagai struktur yang membentuk permukiman, sedangkan nonfisik sesuatu yang membentuk pola kegiatan dalam masyarakat dalam suatu permukiman. Syafrina dkk (2018) mengelompokkan kategori aspek fisik dan nonfisik permukiman yaitu aspek fisik terdiri atas prasarana, sarana,

aksesibilitas dan lokasi, serta desain. Sedangkan aspek nonfisik terdiri atas aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Prasarana dalam aspek fisik adalah jaringan air bersih, jaringan listrik dan komunikasi, jaringan drainase, jaringan jalan, serta jaringan sanitasi dan persampahan. Sarana terdiri atas sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perdagangan, sarana peibadatan, dan ruang terbuka hijau. Aspek nonfisik menjelaskan kenyamanan lingkungan permukiman terdiri dari kesehatan lingkungan, kenyamanan lingkungan, ketenangan lingkungan, termasuk didalamnya hubungan sosial masyarakat. Aspek ekonomi terdiri atas manajemen tata kelola dan keterjangkauan harga perumahan.

Susanti DB (2019) mendefinisikan aspek fisik dapat diamati secara langsung oleh setiap orang melalui elemen interior dan eksterior yang ada di dalam rumah dan lingkungan sekitar hunian. Sedangkan aspek non fisik bisa diamati berdasarkan aktifitas rutin dan budaya pemilik atau penghuni rumah, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa juga diamati berdasarkan simbol atau elemen dekoratif penanda ruang. Christina F (2018) dalam penelitiannya mengkategorikan aspek fisik pada permukiman berkaitan dengan pola spasial yang dimiliki yaitu letak geografis. Sedangkan aspek nonfisik terdiri atas aspek sosial, budaya, dan ekonomi yaitu kepercayaan masyarakat, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, aktivitas penduduk, dan aspek mata pencaharian penduduk.

2.4.3 Konsep Permukiman Berkelanjutan

Sebagaimana telah tertuang pada target tujuan 11 SDGs yaitu menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh sehingga penelitian ini nantinya akan mengacu pada indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Persyaratan permukiman berkelanjutan menurut SDGs adalah memenuhi syarat layak huni. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2017) ada empat indikator dalam menentukan rumah layak huni, Indikator tersebut merupakan adaptasi indonesia terhadap indikator SDGs tujuan ke 11 poin pertama, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan aman. Indikator tersebut antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, dan akses air

minum. Penjelasan keempat kriteria tersebut secara lengkap sebagai berikut.

1. Ketahanan Bangunan

Indikator pertama ketahanan bangunan memiliki sepuluh kriteria global untuk dapat dikatakan sebagai bangunan layak huni, antara lain:

- a. Struktur bangunan permanen
- b. Kesesuaian dengan *Building codes* yang berlaku
- c. Informasi kebutuhan perbaikan besar pada hunian
- d. Tidak berlokasi di sekitar limbah racun
- e. Tidak berlokasi di daerah rawan banjir
- f. Tidak berlokasi di daerah berbahaya, seperti kereta, jalur penerbangan, di bawah kabel listrik, dan di bawah jembatan
- g. Jenis material bangunan atap, lantai, dinding
- h. Informasi kondisi bangunan yang perlu diperbaiki
- i. Hunian tidak terletak di lereng curam
- j. Lokasi hunian

Indikator ketahanan bangunan untuk standar berkelanjutan yang diadaptasi di Indonesia adalah indikator jenis material atap, lantai, dinding (aladin). Bahan bangunan atap harus kuat agar mampu melindungi penghuni rumah dari panas dan hujan. Adapun kombinasi bahan yang dinilai layak untuk atap seperti beton, seng, genteng, kayu, dan sirap. Lantai berfungsi untuk memutus vektor penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman dari tanah yang lembap, sehingga ditentukan bahan bangunan untuk lantai yang dinilai layak seperti marmer atau granit, keramik, tegel atau ubin, parkit atau vinil, kayu atau papan, dan bata merah. Sedangkan dinding harus mampu menjadi penyekat dengan udara luar dan melindungi penghuni dari ancaman luar. Kombinasi bahan bangunan yang dinilai layak untuk dinding seperti tembok, plesteran, kayu atau papan, dan batang kayu (Pokja PPAS, 2020).

2. Kecukupan Luas Bangunan

Indikator kedua kecukupan luas tempat tinggal memiliki lima kriteria global antara lain:

- a. Jumlah orang per ruangan
- b. Jumlah keluarga yang tinggal dalam bangunan rumah

- c. Jumlah anak di bawah lima tahun dalam rumah bangunan
- d. Berapa luas lantai bangunan yang dihuni
- e. Jumlah orang dalam kamar tidur

Indikator yang diadaptasi di Indonesia hanya ada dua yaitu jumlah keluarga yang tinggal dalam bangunan rumah dan berapa luas lantai rumah bangunan yang dihuni. Kedua indikator tersebut dikombinasikan sehingga indikator yang digunakan untuk kecukupan luas tempat tinggal adalah luas lantai per kapita. Ambang batas kebutuhan luas minimum bangunan dan lahan untuk rumah sederhana sehat minimum 7.2 - 12 m² per orang. Kecukupan luas tempat tinggal perlu dipenuhi sesuai fungsi dan kebutuhan ruang gerak penghuni dalam rumah sehingga dapat beraktifitas dengan nyaman.

3. Akses Air bersih

Indikator ketiga akses terhadap air minum layak atau air bersih, syarat yang harus dipenuhi adalah hunian sudah menggunakan sumber air terlindung meliputi air ledeng atau keran, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan, atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor, dan sumur pompa. Sumber air bersih yang berasal dari air kemasan atau air isi ulang dianggap layak jika sumber air untuk kegiatan domestik lainnya seperti memasak dan keperluan MCK termasuk dalam jenis sumber air terlindungi.

4. Akses Sanitasi

Indikator keempat akses sanitasi layak, rumah dianggap layak huni jika akses sanitasi layak memenuhi kriteria antara lain:

- a. Penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu
- b. Bangunan atas atau jenis kloset berupa leher angsa
- c. Bangunan bawah atau pembuangan akhir tinja berupa tangki septik

Saat ini disimpulkan komponen rumah layak huni berdasarkan indikator nasional adalah terpenuhinya keempat indikator atau seluruh kriteria adalah hal yang mutlak, jika ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi maka hunian termasuk dalam kategori tidak layak huni.

Hal tersebut didukung oleh Peraturan Menteri PUPR tahun 2019 yang mengatakan rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah layak huni antara lain kebutuhan minimal masa dan Ruang atau kebutuhan luas, kebutuhan kesehatan dan kenyamanan, dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Kriteria rumah layak huni harus memiliki persyaratan seperti keselamatan bangunan yang meliputi struktur bawah atau pondasi, struktur tengah atau kolom, dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas mengikuti luas minimum layak huni.

Selain harus memenuhi syarat layak huni rumah harus memenuhi syarat kesehatan. Menurut Chandra (2007) dalam Wijaksono S (2011) di Indonesia terdapat suatu kriteria untuk Rumah Sehat Sederhana (RSS) dimana semua kriteria harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai rumah sehat. Kriteria tersebut yaitu bangunan harus berada pada luas tanah antara 60-90 m², saat dibangun luas bangunan paling tidak antara 21-36 m², memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan dapur, berdinding batu bata dan diplester, memiliki lantai dari ubin keramik dan langit-langit dari tripleks, memiliki sumber air bersih dari sumur atau air PAM, dilengkapi fasilitas listrik minimal 450 *watts*, menyiapkan bak sampah dan saluran air kotor.

Konsep lain yang menerapkan pembangunan permukiman berkelanjutan adalah konsep *eco-settlement*. Menurut Dewi KP dkk (2019) *Eco-settlement* merupakan tempat bermukim yang ekologis. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang didukung oleh suatu institusi atau kelembagaan. Permasalahan permukiman tidak bisa ditinjau dari satu perspektif saja, melainkan perlu ditinjau secara menyeluruh, karena bidang permukiman berimplikasi pada berbagai aspek.

Penjabaran Konsep *Eco-Settlement* menurut Dewi KP dkk (2019), yaitu aspek sosial dengan indikator penilaian yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang adalah peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kawasan lingkungan permukiman. Aspek ekonomi indikator yang diidentifikasi yaitu *Local Economy Development* yaitu upaya dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan, yang dilakukan secara partisipatif dari masyarakat,

dengan memandang seluruh aspek dan potensi yang ada pada mereka untuk dikembangkan, sehingga mampu kreatif dan mandiri. Aspek lingkungan Indikator yang digunakan adalah kriteria bangunan berupa kondisi rumah, kepadatan bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi pengolahan persampahan, sistem proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan Pemen PUPR nomor 2 tahun 2016 mengenai kriteria yang harus dipenuhi permukiman kumuh. Aspek kelembagaan Indikator yang digunakan adalah program pemerintah dalam pengembangan kawasan permukiman.

Selain itu, konsep *Eco-Settlement* menurut Puslitbangkim Kementerian Pekerjaan Umum (2006) antara lain dari aspek ekologi memenuhi kriteria kualitas udara termasuk emisi karbondioksida, *biodiversity*, kualitas dan kuantitas air, memenuhi syarat rumah sehat, guna lahan, perubahan iklim, energi, dan teknologi berwawasan lingkungan. Dari aspek sosial memenuhi kriteria pemberdayaan masyarakat, inovasi teknologi, dan kapasitas masyarakat yang mencakup pendidikan, partisipasi, dan kebiasaan, dari Aspek ekonomi memenuhi kriteria pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat. Dari aspek kelembagaan memenuhi kriteria kapasitas institusi yang mencakup kerjasama dan dukungan kebijakan pemerintah.

Konsep permukiman berkelanjutan juga dijelaskan oleh Dyah P dan Nany (2014) dengan indikator sarana prasarana, lingkungan permukiman, kondisi perekonomian, dan kehidupan sosial. Pada indikator sarana prasarana variabel yang ditinjau adalah kondisi sarana prasarana dasar khususnya pelayanan angkutan umum, jaringan jalan, jaringan drainase, dan sanitasi. Pada indikator lingkungan permukiman variabel yang ditinjau adalah fasade bangunan, jarak ke lokasi kerja, kualitas rumah, status kepemilikan, dan kenyamanan tinggal. Pada indikator kondisi sosial variabel yang ditinjau adalah rasa memiliki dengan sub indikator bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kegiatan sosial budaya, frekuensi kegiatan sosial budaya, partisipasi masyarakat, lama tinggal, tempat asal penduduk, alasan tinggal, keinginan pindah, dan keamanan tinggal. Selain itu, variabel interaksi sosial juga dapat ditinjau dengan sub indikator yang

memengaruhi antara lain frekuensi interaksi, lokasi interaksi, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya pada indikator kondisi ekonomi variabel yang ditinjau adalah tingkat pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, biaya dari rumah ke lokasi kerja, dan usaha sampingan untuk meningkatkan perekonomian.

Pada dasarnya konsep permukiman berkelanjutan diinterpretasikan dalam berbagai konsep dan metode. Adapun tinjauan konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai sumber literatur dijabarkan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai sumber

Penulis	Judul	Lingkungan	Indikator			Sumber
			Ekonomi	Sosial Budaya	Kelembagaan	
Santosa NS (2012)	<i>Direction of policy for sustainable human settlement area development in the Fringe of the DKI Metropolitan (Case Study: Settlement area at Cisauk – Banten Province)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase sebagai pengendalian banjir • Air minum berkualitas • Kualitas akses jalan • Pengelolaan persampahan • Metode penambangan pasir dan batu • Luasan alih fungsi lahan pertanian produktif • Manajemen Sub DAS • Luasan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan PAD • Nilai ekonomi lahan • Keuntungan • Perkembangan sarana ekonomi (10 tahun terakhir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik sosial • Kohesi sosial • Kriminalitas • Sarana kesehatan pendidikan • Fasilitas umum dan sosial • Pemberdayaan masyarakat 	-	Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2012 (Institut Pertanian Bogor)
Hamizah Y dkk (2012)	<i>Land Use Regulations towards a Sustainable Urban Housing: Klang Valley conurbation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan polusi • Pengolahan limbah • Keanekaragaman hayati, ekologi dan ekosistem • Ketersediaan infrastruktur • Konservasi sumber daya • Efisiensi (Air, energi, dan material) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan kerja • Ketersediaan kebutuhan • Memfasilitasi akses terhadap transportasi publik • Status Kepemilikan Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan • Menjamin akses <i>green area</i> • Menjangkau tempat kerja dan transportasi umum 	-	<i>Journal of Procedia – Social and Behavioral Science</i> vol 68 tahun 2012 hal 578-589 (Universitas Teknologi MARA)

Penulis	Judul	Lingkungan	Indikator			Sumber
			Ekonomi	Sosial Budaya	Kelembagaan	
Huong NV & Veronica (2003)	Huong, NV & Veronica – <i>Gaps In Understanding Sustainable Housing: Case Study in Adelaide and Hanoi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur memadai • Proteksi terhadap lingkungan sekitar • Penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan • Meningkatkan area hijau • Pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang Bisnis • Memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan sosial masyarakat • Menjamin hubungan antar tetangga • Aman dan nyaman bagi semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas 	Menyeimbangkan semua dimensi melalui kerjasama dan kemitraan	<i>Journal of Architectural Science Review</i> vol 46 tahun 2003 hal 369-374 (Universitas Adelaide)
Ibem E.O & Dominic A (2011)	<i>Framework For Evaluating The Sustainability Of Public Housing Programmes In Developing Countries</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Layak Huni • Memerhatikan Kualitas Lingkungan • Menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitar • Memiliki RTH • Memperhatikan kerapatan rumah dan jenis bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjangkau semua kalangan • Penciptaan lapangan kerja dalam bentuk usaha rumahan • Menjamin kepemilikan rumah pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung akses pada tempat kerja dan ibadah • Kebiasaan masyarakat • Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga 	Dukungan Tata kelola masyarakat	<i>Journal of Sustainable Development and enviromental Protection</i> vol 1 no 3 tahun 2011 hal 24-39 (Covenant University)
Degert I dkk (2016)	<i>Sustainability assessment of a slum upgrading intervention in Bangladesh</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kawasan • Manajemen dampak lingkungan • Sistem drainase lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dana pengelolaan • Pemeliharaan atas infrastruktur terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai budaya • Tingkat pendidikan • Mobilitas • Jenis kelamin 	Keterlibatan Masyarakat	<i>Journal Of Cities</i> vol 56 tahun 2016 hal 63-73 (University College London)

Sumber: Santosa NS (2012), Ibem & Dominic (2011), Hamizah Y dkk (2012), Huong NV & Veronica (2003) Degert I dkk (2016)

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel dalam menilai tingkat keberlanjutan permukiman di kawasan permukiman Ekowisata Mangrove Lantebung yaitu dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan. Masing-masing aspek memiliki indikator dan kriteria yang mencerminkan pengaruh terhadap keberlanjutan aspek bersangkutan. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan adalah penyesuaian dan adaptasi dari tabel indikator-indikator konsep berkelanjutan yang dijelaskan pada **Tabel 2.2** dan dipertimbangkan berdasarkan kondisi eksisting dan preferensi pakar sehingga diperoleh kriteria yang dibutuhkan dalam menilai keberlanjutan sesuai dengan batasan penelitian yaitu pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Kriteria yang digunakan dalam menilai keberlanjutan berdasarkan Indikator Berkelanjutan dari berbagai sumber

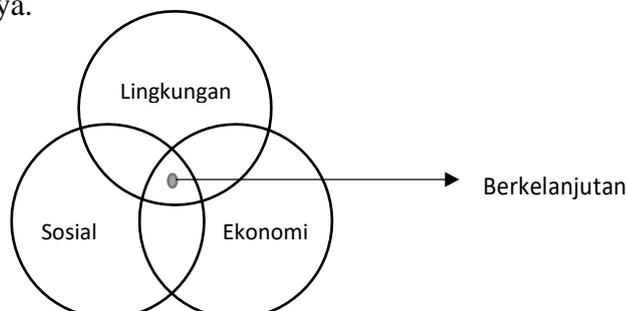
Variabel	Indikator	Kriteria
Aspek Lingkungan	• Layak Huni	• Ketahanan bangunan
		• Kecukupan luas bangunan
	• Kesesuaian terhadap karakteristik lingkungan	• Akses air bersih
		• Akses sanitasi
		• Kesesuaian RTRW
		• Kepadatan bangunan
		• Kondisi Perkerasan Jalan
		• Pengendalian Banjir
		• Daur ulang sampah
		• Sarana Prasarana Dasar Permukiman
Aspek Sosial & Budaya	• RTH	• Ketentuan RTH Minimal Perkotaan
	• Interaksi Sosial	• Frekuensi Interaksi
	• Aksesibilitas	• Akses Transportasi Umum
	• Nilai Budaya	• Adat istiadat, Budaya, Kearifan Lokal
	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pelatihan keterampilan
	• Kriminalitas	• Tingkat Keamanan
Aspek Ekonomi	• Sarana Kesehatan dan Pendidikan	• Fasilitas pendidikan dan kesehatan
	• Kesempatan Kerja	• Lapangan pekerjaan baru
	• Penciptaan Lapangan Kerja	• Usaha Mikro Masyarakat
	• Peningkatan Kesejahteraan	• Tingkat Pendapatan
	• Sumber Pendapatan Lain	• Usaha sampingan
	• Dana Pengelolaan Infrastruktur	• Dana pemerintah atau swasta

Variabel	Indikator	Kriteria
Aspek Kelembagaan	• Status kepemilikan lahan	Pribadi atau milik negara
	• Tata kelola masyarakat	Lembaga dan komunitas yang dibentuk masyarakat
	• Kerjasama dan Kemitraan	Keberadaan program penelitian dan pengabdian masyarakat
	• Keterlibatan Masyarakat	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
	• Program penanganan kumuh	Program pemerintah/swasta
	• Keaktifan lembaga dan komunitas	Frekuensi melaksanakan kegiatan
	• Partisipasi masyarakat	Bentuk partisipasi

2.5 Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan prinsip berkelanjutan adalah pelaksanaan penerapan dari seluruh aspek berkelanjutan mulai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang secara keseluruhan adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan (Rama M dkk, 2018). Menurut Dirjen Cipta Karya (2016) dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan, ada tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, di antaranya pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menurut Ervianto WI (2019) adalah pembangunan yang mengutamakan dan mensinergikan tiga pilar utama yaitu;

- Peningkatan perekonomian masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat melalui tata kelola pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya.



Gambar 2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Ervianto WI, 2019

2.5.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Menurut Andreas Suhono (2016) PBB meresmikan 17 poin SDGs pada tahun

2015 sebagai lanjutan dari *Millennium Development Goals* untuk menangani kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjawab masalah sosial masyarakat untuk kesejahteraan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2017 mendefinisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sinergi antara pilar pembangunan beserta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dijelaskan pada berikut. **Tabel 2.4**

Tabel 2.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Pilar Pembangunan	Tujuan	Tujuan
1	Sosial	Tujuan 1	Penghapusan Kemiskinan
		Tujuan 2	Penghapusan Kelaparan
		Tujuan 3	Kesehatan & Kesejahteraan
		Tujuan 4	Pendidikan Berkualitas
		Tujuan 5	Kesetaraan Gender
		Tujuan 6	Air Bersih & Sanitasi
2	Ekonomi	Tujuan 7	Energi Bersih & Terjangkau
		Tujuan 8	Pertumbuhan ekonomi & Pekerjaan Layak
		Tujuan 9	Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif & Inovatif
		Tujuan 10	Penurunan Kesenjangan
		Tujuan 11	Kota Inklusif & Berkelanjutan
3	Lingkungan	Tujuan 12	Konsumsi & Produksi Berkelanjutan
		Tujuan 13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana
		Tujuan 14	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut
		Tujuan 15	Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
4	Tata Kelola Kelembagaan	Tujuan 16	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Yang Kokoh
		Tujuan 17	Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017

Setiap poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki indikator yang beragam. Menurut data Kementerian Bappenas (2017) terdapat 169 target dan 240 indikator yang digunakan dalam mengukur pelaksanaan dan ketercapaian seluruh target dan tujuan pada agenda tersebut.

2.5.2 Kota Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan 11 yaitu membangun kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu target berfokus pada penanganan permukiman kumuh yaitu memastikan akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Secara rinci target yang ingin dicapai pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Target Tujuan 11 SDGs

Target SDGs-11	
11.1	Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan
11.2	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara
11.3	Memperkuat upaya melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia
11.4	Pada tahun 2030, secara substansi mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang dalam situasi rentan
11.5	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas
11.6	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang tua
11.7	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Sumber: United Nations, 2016

Target yang ingin dicapai dalam agenda tersebut sesuai dengan kondisi eksisting permukiman yang menjadi objek penelitian. Hal ini didasari pada karakteristik kawasan permukiman yang merupakan kawasan kumuh ringan dan terdapat bangunan permukiman yang masih dalam kondisi rumah tidak layak huni.

Sehingga diharapkan target pada tujuan ke 11 poin pertama dapat sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Adapun prinsip berkelanjutan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini mengikuti teori Sakdiah C dan dian (2020) yang berfokus pada pembangunan permukiman berkelanjutan dengan memuat empat prinsip dasar sebagai berikut.

- a. Kesetaraan (*equality*), yaitu masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap perumahan, infrastruktur, dan sumber daya
- b. Keberpihakan pada penduduk miskin (*pro poor*), yaitu menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat ekonomi rendah
- c. Berkelanjutan (*Sustainable*), yaitu mensinergikan peningkatan kualitas lingkungan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi serta tata kelola kelembagaan di masyarakat
- d. Pendekatan Pemberdayaan (*empowerment approach*), yaitu melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di wilayahnya.

2.6 Karakteristik Kawasan Ekowisata

Lokasi penelitian termasuk sebagai kategori kawasan ekowisata mangrove berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Makassar. Sehingga dalam memberikan arahan penanganan penting untuk menyesuaikan kondisi lahan sebagai kawasan ekowisata. Butarbutar RR (2021) menyebutkan karakteristik ekowisata yaitu obyek dan atraksi wisatanya berkeitan dengan sumber daya alam dan lingkungan, mendukung keikutsertaan wisatawan dalam aktivitas pembelajaran, edukasi, rekreasi, dan riset tentang alam. Serta mendukung keterlibatan komunitas atau masyarakat disekitarnya dalam penyediaan tempat menginap, produksi barang atau jasa dan layanan.

Kiper T (2013) menyebut ekowisata sebagai wisata alternatif, yang berarti mengunjungi alam dalam rangka belajar atau melakukan kegiatan berwawasan lingkungan, yaitu pariwisata berdasarkan pengalaman alam, yang memungkinkan ekonomi dan sosial pengembangan masyarakat lokal. Ini berfokus terutama pada

pengalaman dan pembelajaran tentang alam, bentang alamnya, flora, fauna dan habitatnya, serta artefak budaya dari lokalitas. Menurut Firman dkk (2019) upaya dalam peningkatan dan pemanfaatan sumber daya lokal pada suatu wilayah adalah melalui pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata. Kawasan wisata yang dikembangkan dalam konteks mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan upaya konservasi alam.

Menurut Wood (2002) dalam Awalyah R dkk (2021) strategi pengembangan ekowisata untuk memenuhi kebutuhan kawasan dapat dilakukan dengan peningkatan komponen kawasan ekowisata. Adapun komponen ekowisata yang dapat ditingkatkan adalah kontribusi terhadap konservasi biodiversitas, keberlanjutan kesejahteraan masyarakat lokal, mencakup interpretasi atau pengalaman pembelajaran, melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisatawan dan industri pariwisata, berkembangnya usaha skala kecil, menggunakan sumber daya baru dan terbarukan, serta fokus pada pemberdayaan dan kepemilikan, serta kesempatan usaha.

Chesworth (1995) dalam Kiper T menyebut ekowisata memiliki enam karakteristik yaitu ekowisata melibatkan perjalanan ke alam yang relatif tidak terganggu dan situs arkeologi, ekowisata berfokus pada pembelajaran dan kualitas pengalaman, secara ekonomi ekowisata menguntungkan penduduk setempat, ekowisata berusaha untuk melihat spesies langka dan lanskap spektakuler yang tidak biasa, ekowisata tidak menghabiskan sumber daya tetapi bahkan melestarikan lingkungan.

Tujuan keberadaan kawasan ekowisata pada dasarnya untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan dan memungkinkan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada jenis pemanfaatan yang ramah lingkungan dan ekologis serta berkelanjutan dan dapat diterapkan secara ekonomis (Kiper T, 2011).

Lokasi penelitian termasuk sebagai kawasan ekowisata mangrove, dimana pengembangan kawasan ini sebagai ekowisata memerlukan penanganan dan sumber daya yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Berdasarkan penelitian

Rini dkk (2018) kesesuaian karakteristik sumber daya dan lingkungan untuk pengembangan wisata dilihat dari aspek keindahan alam, keamanan, dan keterlindungan kawasan. Sehingga dalam penanganan permukiman di sekitar Ekowisata Mangrove Lantebung harus memerhatikan keterlindungan dan kelestarian kawasan.

2.6.1 Kawasan Permukiman dan Ekowisata

Kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata perlu didukung dengan penanganan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Kawasan permukiman yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong permasalahan perekonomian penduduk. Dibutuhkan penataan permukiman yang lebih terarah untuk mendukung potensi yang dimiliki oleh kawasan wisata khususnya pada kawasan ekowisata (Arifin M dkk, 2021).

Kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata perlu didukung dengan penanganan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Penanganan permukiman yang tepat mampu mendukung keberlanjutan kawasan ekowisata. Menurut Wardani dkk (2012) dalam Rusli dkk (2016) untuk mendukung tercapainya hubungan pembangunan permukiman dan ekowisata perlu dukungan baik secara fisik maupun non fisik. Dukungan fisik misalnya berupa tenaga dan dukungan non fisik berupa dana dan pikiran. Sejalan dengan Silas (2000) dalam Rusli dkk (2016) yang mengemukakan tipologi fungsi ruang permukiman dengan menggalang potensi alam, dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian yaitu mengintegrasikan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan fungsi lain kawasan yaitu sebagai kawasan ekowisata mangrove sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Kiper T (2013) menekankan adanya kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata, dan hubungan antara pariwisata dan lingkungan jauh lebih kuat daripada di sektor lain. Ekowisata harus memperhitungkan implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan, untuk berhasil. Ketentuan dalam menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di sekitar kawasan ekowisata adalah kondisi yang nyaman, bersih, aman, dan mengikuti kaidah estetika

lingkungan. Konsep penataan juga dapat diarahkan pada penataan sarana dan sarana permukiman untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata (Arifin M dkk, 2021).

2.6.2 Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung

Ekowisata Mangrove Lantebung merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai kawasan ekowisata berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2005-2025. Secara administratif, destinasi ini terletak di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Lantebung merupakan wilayah yang berbatasan dengan pantai dan merupakan kawasan endemik mangrove.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034 kawasan ini termasuk sebagai kawasan strategis kota dengan sudut pertumbuhan ekonomi dan sebagai kawasan konservasi serta perlindungan ekosistem pesisir. Kawasan ini mulai dikelola tahun 2006 hingga sekarang. Pada awalnya pengelolaan ekowisata mangrove Lantebung dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Sejak tahun 2010 pemerintah Kota Makassar dan masyarakat telah melakukan kegiatan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Lantebung. Sehingga banyak anakan mangrove ditemukan di bagian bibir pantai.

Hasil penelitian Rini dkk (2018) menunjukkan bahwa kawasan mangrove Lantebung sesuai untuk kegiatan wisata dengan nilai kesesuaian mencapai 66.67 persen. Panjang kawasan yang dapat dimanfaatkan 2 km atau seluas 12 hektar dan daya dukung sebesar 182 orang per hari. Jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan sangat beragam mulai dari swafoto, mengamati satwa, edukasi seputar tanaman mangrove, wisata perahu menuju pelabuhan untia, dan menikmati suasana matahari tenggelam.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung melibatkan keterlibatan masyarakat. Menurut Chaminra T dkk (2021) dalam pengelolaan kegiatan wisata di kawasan Mangrove Lantebung pemerintah setempat memanfaatkan peluang yang ada seperti kerjasama dengan Dinas Pariwisata, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat melalui pendekatan sektor bisnis, sektor

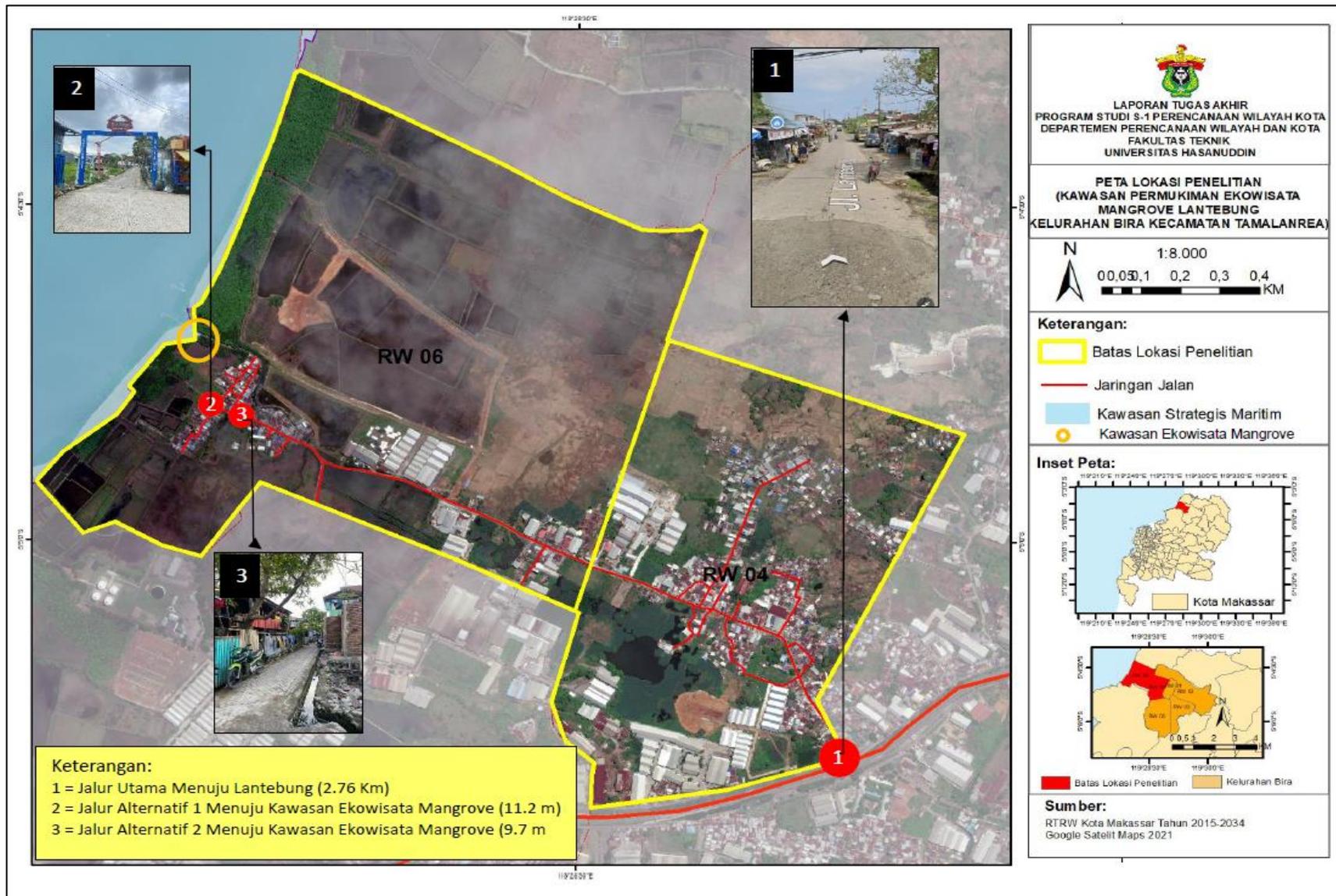
non bisnis, dan sektor pemerintahan. Pengembangan wisata ini sebagai ajang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan mampu mewujudkan industri pariwisata yang melibatkan komunitas masyarakat.

Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat yang terletak di RW 06 Kelurahan Bira. Selain sebagai kawasan ekowisata, aktivitas masyarakat di sekitar wilayah ekosistem mangrove di Lantebung adalah menangkap kepiting, udang, kerang dan keperluan kayu bakar. Sehingga dibutuhkan konsep strategi penanganan permukiman yang memperhatikan kondisi keberlanjutan dan keberlanjutan ekosistem mangrove.

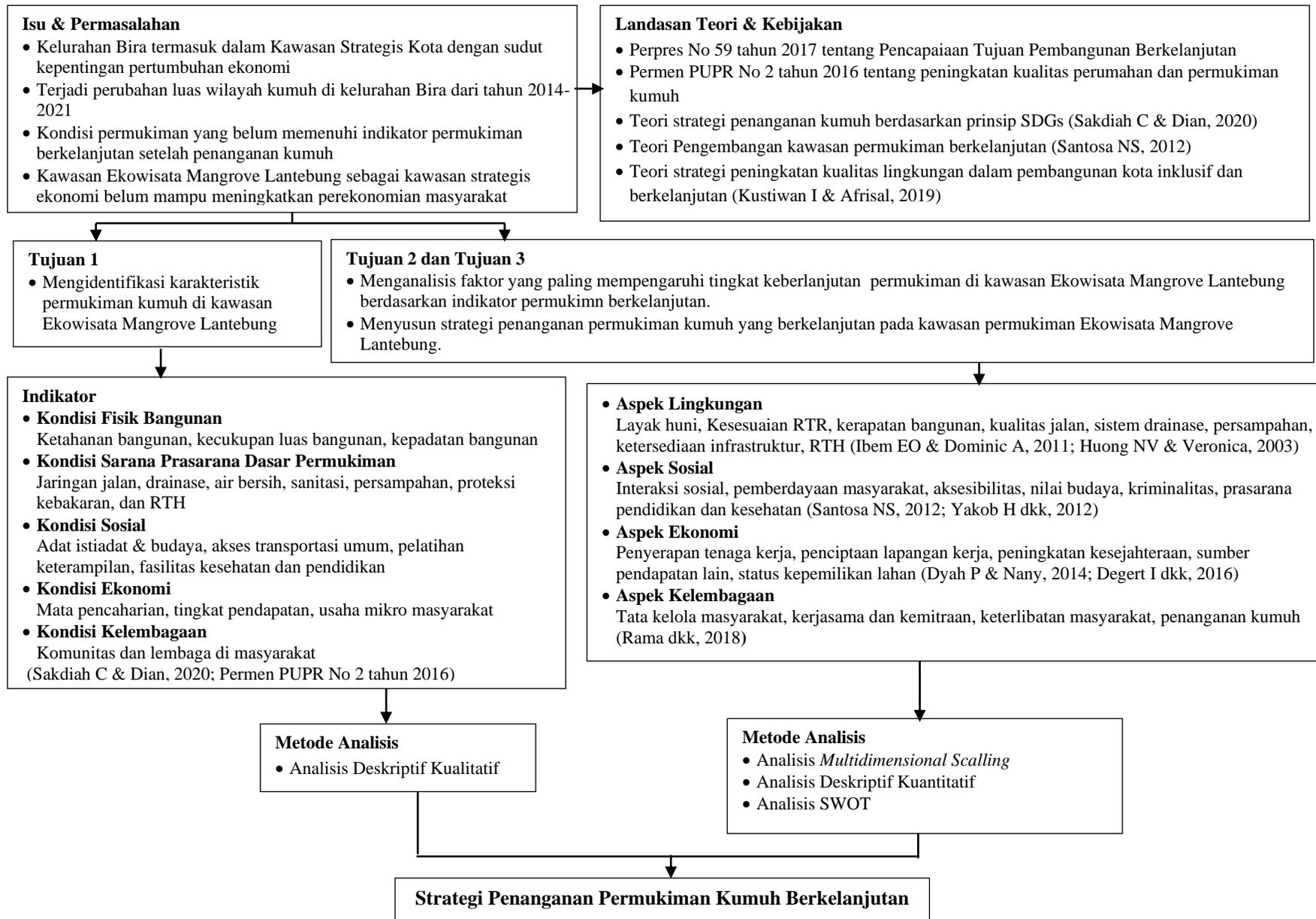
Akses menuju kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung ini termasuk sangat mudah dijangkau. Jarak jalan utama menuju kawasan Ekowisata Mangrove sekitar 2.76 km. Kondisi jalan utama menuju kawasan mangrove cukup bagus, karena di wilayah ini terdapat pergudangan yang dilalui truk petikemas. Namun setelah melalui jalur utama, beberapa jalan masih sulit untuk ditembus roda empat karena masih berupa jalan lingkungan yang lebarnya tidak sesuai dengan standar teknis, sehingga mengharuskan pengunjung untuk memarkir kendaraan sejauh 11.2 meter dari pintu masuk kawasan ekowisata. Selain itu terdapat jalur alternatif lain yang berjarak 9.7 meter namun lebar jalan hanya 2.3 meter yang tidak memadai untuk kendaraan roda empat. Berikut peta jalur menuju kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung dijelaskan pada **Gambar 2.2**.

2.7 Kerangka Konsep

Teori-teori yang mendukung penelitian ini bersumber dari berbagai literatur, sehingga perlu penjabaran lebih rinci untuk mempermudah arah penelitian. Berikut gambaran kerangka konsep dalam penelitian ini dijelaskan pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2.2 Peta Jalur Menuju Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung
 Sumber: Peta Dasar Dari Google Earth, Shapefile dari RTRW Kota Makassar 2015-2035, diolah oleh penulis (2021)



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

2.8 Penelitian Terdahulu

Teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian tersebut dijelaskan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
1	Rama dkk (2018)	Prospek Penanganan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Bandarharjo Kota Semarang	Mengevaluasi dan mengkaji penanganan permukiman kumuh dari aspek-aspek berkelanjutan serta bagaimana prospek penanganan kawasan permukiman kumuh pasca pelaksanaan program khususnya pada kawasan pesisir.	Analisis deskriptif kualitatif	Penanganan kumuh berkelanjutan ditinjau dari empat aspek yaitu ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan	Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan kawasan dan hanya berfokus pada evaluasi penanganan NUSP di kawasan penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek berkelanjutan yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan diterapkan pada penanganan permukiman kumuh di lokasi penelitian	Prosiding ASPI Universitas Gadjah Mada (UGM, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota)
2	Dyah P dan Nany (2014)	Penilaian Keberlanjutan Permukiman Kampung Lama di Kelurahan Lemponsari	Menilai keberlanjutan kampung lama di kelurahan Lempong Sari sebagai salah satu permukiman bersejarah di Kota Semarang	Analisis deskriptif kuantitatif dengan skala likert	Indikator yang digunakan dalam meninjau keberlanjutan permukiman	Penelitian sebelumnya menggunakan skala likert dalam menentukan indeks keberlanjutan	Hasil penelitian menunjukkan keberlanjutan permukiman termasuk dalam kategori keberlanjutan sedang dengan nilai indeks hasil pembobotan yaitu 2,25	Jurnal Teknik PWK Vol 3 No 4 Universitas Diponegoro

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
3	Santosa NS (2012)	Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan Di Pinggiran Metropolitan DKI Jakarta (Studi kasus: Kawasan Permukiman di Cisauk, Provinsi Banten)	Mengetahui dinamika perkembangan kawasan permukiman dalam sistem metropolitan DKI Jakarta, mengetahui tingkat keberlanjutan kawasan permukiman kumuh di Cisauk, mengetahui faktor paling berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan, menyusun arahan kebijakan	Analisis Multidimensional Scalling (MDS), analisis prospektif, dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Menentukan indeks keberlanjutan dan faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan sebelum menentukan arahan pengembangan kawasan.	Penelitian sebelumnya menggunakan analisis AHP dalam menentukan arahan pengembangan kawasan	Hasil penelitian ini berupa tingkat keberlanjutan dan faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan yang menjadi dasar dalam menentukan arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman	Disertasi Insitut Pertanian Bogor (IPB, Sekolah Pascasarjana)

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
4	Sakdiah C dan Dian (2020)	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip <i>Sustainable Development Goals</i>	Merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan prinsip <i>Sustainable Development Goals</i> yang dijelaskan pada poin ke-11.	Analisis deskriptif kualitatif dan Triangulasi	Indikator yang digunakan dalam menentukan karakteristik kumuh kawasan permukiman	Penelitian sebelumnya menggunakan analisis triangulasi dalam menentukan strategi penanganan permukiman kumuh	Strategi penanganan kumuh yang dirumuskan dirinci berdasarkan karakteristik kumuh kawasan dan terbagi dalam dua kategori yaitu kawasan ilegal dan legal.	Jurnal Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota)
5	Arifin M dkk (2021)	Konsep Penataan Permukiman yang Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pulau Lakkang	Mengidentifikasi kondisi fisik dan non-fisik pemukiman Lakkang dan menganalisis serta menyusun konsep pengaturan pemukiman yang mendukung pariwisata berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal	Analisis Spasial dan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Merumuskan konsep penataan permukiman dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi fisik dan non fisik permukiman	Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penataan pariwisata berkelanjutan	Hasil dari penelitian ini berupa konsep pengembangan pariwisata berdasarkan konsep 4A (<i>attraction, accesibility, amenity, ancillary</i>) Konsep penataan permukiman diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan dan ragam aktivitas pariwisata.	Jurnal Teknik PWK Vol 10 No 1 hal 65-75 Universitas Diponegoro

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
6	Yusuf dan Yutfi (2020)	Tinjauan Konsep Keberlanjutan Pada kawasan Permukiman Summarecon Bekasi Dalam Aspek Sosial	Perencanaan permukiman dengan menerapkan tinjauan keberlanjutan sosial yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup penghuni dalam hal sosialisasi	Analisis kualitatif deskriptif	Indikator yang digunakan dalam menentukan keberlanjutan pada aspek sosial	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek yaitu aspek sosial tanpa mengaitkan hunungan dengan aspek lain	Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberlanjutan permukiman di kawasan permukiman Summarecon Bekasi dari aspek sosial sangat baik yang ditinjau dari skala urban, skala lingkungan, dan skala bangunan.	Jurnal Arsitektur PURWARUPA (Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta)
7	Kustiwan I dan Afrisal (2019)	Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung	Merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampung kota. Baik dari aspek fisik lingkungan maupun sosial ekonomi, melalui indeks atau status keberlanjutan lingkungan	Analisis kualitatif deskriptif dan statistik dan analisis SWOT	Proses perumusan strategi melalui analisis SWOT dengan mengaitkan pada prinsip pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dua indikator yaitu keberlanjutan fisik lingkungan dan sosial ekonomi	Hasil penilaian terhadap 41 indikator yang dikelompokkan ke dalam aspek keberlanjutan fisik dan keberlanjutan sosial ekonomi, disimpulkan bahwa keberlanjutan sosial ekonomi lebih tinggi dari aspek fisik lingkungan. Dimana kondisi fisik lingkungan perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi.	<i>Journal of Regional and Rural Development Planning</i> ITB

Sumber: Rama dkk, 2018; Dyah P dan Nany, 2014; Santosa NS, 2012; Sakdiah C dkk, 2020; Arifin M dkk, 2021; Yusuf dan Yutfi, 2020; Kustiwan I dan Afrisal, 2019 Rangkuman Penelitian penulis, 2021